

“Kita Tidak Akan Pernah Menjadi Perekonomian Liberal”

Wawancara dengan *Sri Mulyani Indrawati*
Direktur Eksekutif IMF Mewakili 12 Negara Asia Tenggara

Meski banyak menuai kritik dari banyak pihak tetapi toh kebijakan untuk memprivatisasi sejumlah BUMN sudah berjalan. Beberapa pihak menyebut privatisasi sebagai proses liberalisasi regulasi. Di mana di dalamnya terdapat transformasi besar-besaran menuju ekonomi liberal. Sebab, privatisasi membuka peluang modal asing untuk masuk dan mengelola sektor usaha tertentu yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ide awal privatisasi di Indonesia berasal dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Privatisasi disyaratkan oleh IMF dan World Bank karena memberikan peluang kepada pemodal asing untuk masuk menanamkan investasinya, sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Partisipasi swasta/asing dianggap perlu sebagai penetrasi pasar dan mengubah kultur korup dikalangan pengelola BUMN. IMF yakin privatisasi akan berhasil memulihkan perekonomian Indonesia jika dilakukan dengan bersih dan benar serta dilengkapi dengan aturan yang mendukung untuk melindungi kepentingan masyarakat. Persoalannya adalah adakah sistem kontrol yang ketat dalam mengawasi jalannya privatisasi?, mengingat beberapa prakek privatisasi yang sudah berlangsung tidak transparan.

Wawancara tertulis dengan Direktur Eksekutif IMF untuk Kawasan Asia Tenggara, Sri Mulyani Indrawati berikut ini akan memberikan gambaran tentang logika ekonomi yang dibangun IMF untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan kemampuan pemerintah membangun infrastruktur untuk rakyatnya.

Apa motivasi IMF mengusulkan privatisasi untuk mengatasi perekonomian Indonesia?

Privatisasi diartikan sebagai partisipasi swasta dalam kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh pemerintah (baik sebagian atau penuh). Bagi pihak yang menyetujui langkah ini, pengikutsertaan pihak swasta dalam pengelolaan dan aktivitas ekonomi dianggap memberikan berbagai manfaat dan keuntungan, seperti modal baru/*fresh* untuk pengembangan usaha, perbaikan atau peningkatan teknologi, penetrasi pasar, perbaikan *governance*, dan mengubah kultur perusahaan yang buruk dari BUMN. Terutama dalam mencegah atau setidaknya mengurangi korupsi oleh aparat/pengelola BUMN yang sering didominasi oleh tujuan hanya ingin melayani bos (pemerintah) dan tidak terlalu peduli dengan kinerja perusahaan. Hal yang terakhir ini terkait dengan fakta bahwa BUMN memiliki kelemahan inheren yaitu dalam hubungan antara *principal* (pemilik-pemerintah) dengan agen (pengelola-manajemen BUMN). Pihak *principal* sering kali tidak memiliki visi, keahlian/kapasitas, dan insting pengelolaan usaha yang memadai, sehingga cenderung membebani BUMN dengan berbagai misi dan tujuan yang sering saling berlawanan (konflik).

Misalnya tujuan BUMN menciptakan lapangan kerja diartikan merekrut karyawan sebanyak-banyaknya (termasuk anggota keluarga dan kroni) sehingga mengorbankan efisiensi dan kinerja perusahaan. Hal ini menyebabkan kinerja manajemen dan perusahaan menjadi buruk, tidak efisien, korup, dan tidak sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yaitu mengelola sumber daya ekonomi secara efisien dan baik untuk kemanfaatan masyarakat. Dengan adanya pihak swasta yang memiliki modal, kompetensi, dan keahlian di bidang usaha tersebut, maka disiplin dan orientasi perusahaan menjadi makin jelas dan fokus, sehingga kinerjanya menjadi baik.

Pihak yang tidak setuju dengan privatisasi memiliki berbagai alasan yang berbeda-beda, tergantung faktor kepentingannya. Pihak pemilik (pemerintah), manajemen, dan buruh atau pemasok BUMN yang selama ini menikmati BUMN sebagai sumber pendapatan pasti dan cukup melimpah, apalagi kalau ditambah dengan kebebasan untuk menggunakan BUMN sebagai sapi perah, maka alasan penolakan akan sangat jelas, yaitu hilangnya sumber nafkah atau sapi perah yang aman dan nyaman. Para karyawan akan takut diPHK karena alasan efisiensi. Pihak politisi, bisa menggunakan alasan sentimen nasionalisme untuk mendapat *leverage* posisi politik, sekaligus kalau nanti berkuasa mungkin juga bisa menikmati BUMN sebagai alat sapi perahnya.

Pihak LSM dan akademisi yang peduli lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar BUMN, mencemaskan eksploitasi sumber daya alam makin tidak terkontrol dan destruktif, yang menyebabkan masyarakat sekitarnya makin terpinggirkan dan tidak mungkin ikut menikmati kesejahteraan. Pihak lainnya juga mungkin akan khawatir bahwa privatisasi akan hanya memindahkan monopoli/oligopoli kepada pihak swasta. Misalnya sektor listrik, telekomunikasi, sarana/prasarana, seperti jalan tol, air, dll, yang akan makin mencekik kepentingan masyarakat karena pihak swasta akan cenderung menaikkan tarif produknya demi kenaikan keuntungan tanpa perlu bertoleransi terhadap daya beli masyarakat.

Hal ini akan terjadi bila privatisasi dilakukan melalui proses yang tidak bersih (korup atau penuh KKN), sehingga pihak yang menang dalam privatisasi tidak memberikan nilai tambah perusahaan tapi justru menjadi pengganti benalu yang lama.

Saya rasa saya tidak dalam posisi mengatakan bahwa privatisasi merupakan obat mujarab yang dapat menyembuhkan sekaligus berbagai penyakit BUMN seperti inefisiensi, korupsi, dan berbagai penyakit BUMN kronis lainnya. Privatisasi yang dilakukan secara cermat dan bersih, menghasilkan pemenang privatisasi benar-benar pihak yang memiliki modal, teknologi, dan kompetensi yang lebih baik. Juga bila dibarengi dengan aturan di sektor industri yang menyangkut kompetisi yang sehat, aturan lingkungan hidup yang kuat, aturan tanggung jawab sosial yang jelas, dan UU perlindungan konsumen yang pasti dan berjalan efektif, akan menghasilkan manfaat yang hendak dicapai yaitu perusahaan akan membaik (efisien, berkembang, serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang baik). Selain itu masyarakat tidak akan dirugikan secara sosial, lingkungan, maupun dalam tingkah laku kompetisi yang wajar.

Dari sisi pemerintah sebagai pemilik, bila privatisasi dilakukan secara benar artinya dengan rencana dan tahapan serta aturan-aturan yang baik, prosesnya bersih, kredibel (termasuk transparansi penilaian dan tujuan privatisasi), dan eksekusi proses secara kompeten, maka akan memberikan manfaat yang sangat banyak. Misalnya, pertama, pemerintah akan diuntungkan dari segi pendapatan privatisasi yang berguna untuk mendukung APBN terutama yang telah dibebani dengan besarnya hutang dalam negeri akibat krisis perbankan. Kedua, beban dan resiko pemerintah akan berkurang karena BUMN telah memiliki pemilik lainnya yaitu swasta yang akan turut bertanggung jawab dari segi permodalan, teknologi, perbaikan *governance*, dan kinerja lainnya

dari perusahaan. Ketiga, BUMN akan menjadi lebih efisien dan *profitable*, sehingga bukan lagi sebagai insitusi yang *memoroti* pemerintah tapi justru menjadi menjadi penyettor pajak. Keempat, perusahaan yang baik akan menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan privatisasi yang dilakukan dengan proses yang baik dan bersih, kredibel akan mengundang kepercayaan para pemodal internasional, karena sebagai contoh/ bukti bahwa pemerintah memiliki niat dan kesungguhan politik untuk menciptakan lingkungan usaha yang baik, bersih, dan efisien, serta *level playing field* yang baik.

IMF bisa memasukkan privatisasi sebagai salah satu program pemulihan ekonomi Indonesia, tentunya dilandasi atas kepercayaan bahwa privatisasi akan membawa berbagai manfaat dan kebaikan bagi perekonomian Indonesia sekaligus menolong mengurangi beban pemerintah yang sangat berat akibat krisis. Namun seperti saya jelaskan di atas, manfaat dan kebaikan privatisasi hanya tercapai bila proses dan eksekusi dilakukan secara bersih dan kredibel, serta dilengkapi aturan untuk melindungi kepentingan umum seperti lingkungan, kompetisi, konsumen, sosial, bahkan kepentingan karyawan.

Pertimbangan apa saja yang digunakan IMF saat memberikan “resep” privatisasi? Apakah di dalamnya sudah mempertimbangan kondisi ekonomi (juga sosial dan politik) yang ada di Indonesia?

Saya rasa pertimbangannya sangat teknokratis, yaitu alasan manfaat yang disebutkan di atas. Pemerintah kita yang seharusnya melihat kebijakan tersebut dalam kacamata politis dan sosial, serta menjalankannya sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Termasuk dalam hal ini kebutuhan untuk sosialisasi, membentuk tim yang bersih dan berwibawa, serta mengkaji berbagai aspek secara matang untuk dijelaskan kepada publik sehingga masyarakat (dan politisi) memahami kebijakan tersebut. Masalahnya dalam kasus privatisasi kita, sering dilakukan melalui proses dan eksekusi yang tidak kredibel serta masih tidak dilengkapi dengan aturan pendukung untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Sering juga pemerintah tidak melakukan sosialisasi yang memadai sehingga isu privatisasi bisa digunakan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk melindungi kepentingan sendiri dan mengalihkannya menjadi isu politik. Inilah yang lantas menyebabkan isu privatisasi menjadi tidak produktif dan tidak konstruktif. Mungkin saja proses privatisasi dianggap tidak bersih dan kredibel, sehingga juga menimbulkan pertanyaan apakah manfaat akan diperoleh melalui privatisasi.

Apakah privatisasi merupakan kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia?

Kalau dilakukan secara bersih dan benar serta dilengkapi dengan aturan yang mendukung untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen, karyawan, dan penduduk sekitar), saya rasa privatisasi bisa memberikan manfaat bagi kita.

Sebenarnya tujuan privatisasi untuk efisiensi perusahaan negara atau untuk mendapatkan dana dari hasil penjualan saham BUMN untuk menutupi defisit keuangan negara?

Seperti penjelasan di atas, saya rasa tujuan menutup defisit merupakan salah satu tujuannya, namun tujuan terpenting adalah mengelola sumber daya ekonomi secara baik dan efisien serta berkesinambungan, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Setelah melihat perkembangan ekonomi pasca diterapkannya privatisasi, -di mana perekonomian Indonesia tak kunjung menunjukkan perubahan ke arah perbaikan-, mengapa privatisasi tetap saja "dipaksakan" untuk diterapkan?

Perekonomian tidak kunjung membaik? Saya pertanyakan pernyataan ini, yang dimaksud tidak membaik dari sisi apa? Dilihat dari berbagai indikator dalam perekonomian ada indikasi membaik, baik dari sisi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, juga kondisi mikro seperti perbankan dan perusahaan. Dilihat dari rasio modal, rasio hutang, kinerja perusahaan lain, telah terjadi indikasi membaik. Menurut saya yang dirasa masih belum membaik karena adanya hutang pemerintah yang membengkak akibat krisis. Hutang yang meningkat lebih dari 50% dari GDP kita akibat krisis perbankan memang tidak akan bisa diselesaikan dalam 5 (lima) tahun, mungkin akan selesai 20 (dua puluh) tahun lagi kalau kita konsisten dengan perbaikan ekonomi (stabilitas dan pertumbuhan disertai pemerataan) terjadi terus menerus. Perasaan tidak membaik mungkin juga muncul akibat indikasi bahwa investasi belum kembali seperti jaman sebelum krisis. Kalau persoalannya pada kepercayaan investor yang masih lemah, saya justru akan mengatakan bahwa ini merupakan salah satu akibat pemerintah yang tidak progresif dan tidak melakukan program privatisasi yang bersih dan kredibel. Sehingga *image* yang terjadi justru memburuk.

Lihat contoh, privatisasi Indosat, banyak kecurigaan mengenai proses privatisasi yang menyebabkan *image* privatisasi memburuk, dan digunakan oleh kepentingan politik untuk menganulir pemenangnya. Preseden seperti ini selalu menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian bagi investor yang akan berusaha di Indonesia. Banyak investor yang datang ke Indonesia baik melalui jalur privatisasi (membeli sebagian saham BUMN) maupun divestasi aset BPPN, sering dihambat secara brutal oleh berbagai pihak, dari pihak pemerintah (pusat dan daerah), parpol, dan politisi (DPR/DPRD), juga masyarakat daerah, bahkan juga para karyawan. Ingat berbagai kasus privatisasi dan divestasi yang menggambarkan hal tersebut, mulai dari Bank Bali yang nyaris dibeli Standard Chartered, Bank yang pada jaman Presiden Habibie diboikot karyawan dan pemilik; kasus Semen Padang yang dibeli oleh Cemex Mexico, Kasus Indosat, dll. Kalau investor yang datang selalu diperlakukan seperti ini, yang salah tentu bukan kebijakan dan konsep privatisasinya, tetapi kita semua yang masih menerapkan premanisme dalam pengelolaan ekonomi.

Sebenarnya, indikasi apa yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat keberhasilan/kegagalan privatisasi?

Indikator untuk perusahaan tentunya langsung dapat dilihat apakah perusahaan berkembang membaik setelah privatisasi, seperti: produksi, penjualan, efisiensi perusahaan, teknologi, dan keuntungan. Juga manfaat lebih besar seperti apakah perusahaan membaik dalam hal pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, manfaat sosial, dll.

Kita bisa saja mengkhawatirkan privatisasi di mana pihak yang membeli perusahaan bukan mereka yang punya kompetensi di bidang tersebut tapi hanya merupakan perusahaan broker (*vulture company*) yang ingin mengambil manfaat dari penjualan perusahaan dengan harga yang sangat tertekan. Perusahaan ini hanya akan mengambil keuntungan sesaat, dan mungkin tidak memberikan banyak manfaat bagi perbaikan perusahaan dalam jangka pendek, karena mereka hanya akan menunggu pasar yang membaik dan menjual lagi perusahaan kepada mereka yang benar-benar kompeten di bidangnya.

Kalau Indonesia suasananya masih sangat tidak pasti dan banyak premanisme dalam perekonomian, saya khawatir yang berani masuk ke negeri kita ya hanya kelompok perusahaan broker (*vulture company*) yang hanya mencari manfaat pada saat harga BUMN dan aset tertekan juga pada saat kita tersudut oleh kepentingan menambal defisit APBN. Ini memang seperti lingkaran setan,

kalau suasana politik kita makin keruh dengan kompetisi yang tidak sehat, privatisasi akan menjadi salah satu korban, yaitu negara tidak mendapatkan pembeli dan harga yang baik. Perusahaan dalam jangka pendek tidak diuntungkan karena pembeli swasta tidak punya minat benar-benar ingin memperbaiki perusahaan dalam jangka panjang. Kita tentu menginginkan investor yang datang adalah yang punya komitmen jangka panjang dan memiliki *track record* yang baik. Tapi ini hanya akan terjadi bila kita menciptakan suasana dan eksekusi kebijakan yang baik, kredibel, dan *predictable*.

Bagaimana dengan tanggung jawab negara dalam menyediakan jasa layanan dasar dan kaitannya dengan privatisasi yang diresepkan IMF dan World Bank?

Layanan dasar yang murni *public good* tentu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, karena di bidang ini memang pihak swasta tidak mungkin masuk.

Privatisasi seperti apa dan proses privatisasi yang bagaimana yang harus ditempuh sehingga privatisasi bisa berjalan dengan baik?

Kepemimpinan politik yang punya visi, perencanaan, dan arah kebijakan yang baik dan transparan, sosialisasi yang cukup dan pelaksanaan yang bersih dan kredibel. Ini harus ditopang dengan hukum dan kepastian politik yang baik.

Banyak pihak mengatakan bahwa privatisasi merupakan transformasi besar-besaran menuju penyelenggaraan sistem ekonomi liberal sebab privatisasi pada intinya memindahkan kedaulatan negara dari tangan rakyat ke tangan para pemodal internasional (berkaca pada kasus kepemilikan beberapa persen saham Semen Gresik ke Cemex S.A; Telkomsel ke Singtel; Indosat oleh STTC)...

Apakah di dunia ini ada yang mengadopsi ekonomi liberal? Setiap perekonomian mengenal satu atau beberapa regulasi dan rambu-rambu untuk mengatur tingkah laku maupun arus barang jasa dan modal antar negara. Terminologi “Ekonomi Liberal” merupakan terminologi yang dibuat untuk memberikan kesan menakutkan bagi rakyat atau pelaku ekonomi untuk berinteraksi secara sehat dan proposional dengan dunia di luar negerinya. Walaupun negara melakukan privatisasinya -untuk Indonesia yang masih punya ratusan BUMN masih jauh untuk sampai di suatu titik yang disebut semua akan dijual, dan ekonominya akan menjadi total liberal- rasanya kita TIDAK AKAN PERNAH menjadi perekonomian yang liberal. Kalau kepemilikan kita pada unit usaha menurun, toh pemerintah masih bisa “mengatur” ekonomi

melalui berbagai instrumen lain, apakah itu instrumen makro (pajak, moneter, nilai tukar, bahkan arus modal), hingga instrumen regulasi. Misalnya kita bisa saja untuk keselamatan negara suatu industri harus diatur secara lebih ketat (biasanya untuk keperluan pertahanan/militer/dll).

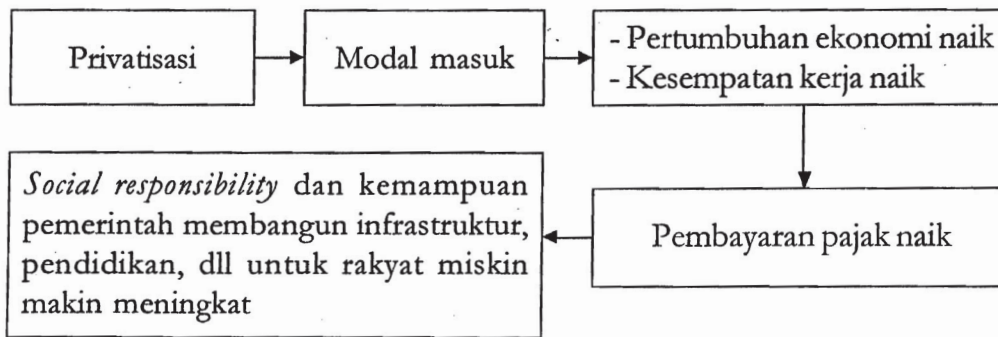
Jika dalam kurun waktu selanjutnya akan banyak BUMN yang terjual kepada para pemodal internasional, tentunya perekonomian Indonesia akan tunduk pada bentuk kolonialisme modal internasional?

Kolonialisme modal internasional? (lagi-lagi ini jargon politik yang sangat stigmatif) Sebaiknya harus dilihat lebih dalam, apakah modal yang masuk katakanlah penanam modal asing yang membeli perusahaan kita—akan menjajah kita atau kita yang menjajah mereka—atau kita sama-sama untung. Sepertinya perlu dijelaskan yang disebut menjajah. Apakah mereka mengambil *resource* kita? rasanya bisa ya dan tidak. Bagaimana anda melihat fenomena Unilever, perusahaan Nike, Reebok, Sony, dll atau perusahaan otomotif? Rasanya mereka menanam modal, menciptakan kesempatan kerja, mencoba mendapat keuntungan tapi tidak atas kerugian kita. Ini namanya *positive sum game*. Yang dibayangkan saudara Sony (Revisond Baswir, Red) barangkali PMA yang *zero sum game*, kalau sana untung kita rugi. Rasanya ini hanya terjadi kalau kita mau dikibuli dan dikorup oleh mereka.

Mungkin saja hal ini benar untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan/ekstraktif. Tapi untuk migas sebenarnya bisa kita atur *term* yang menguntungkan negara dan tidak melulu perusahaan asing masuk nyedot minyak dan jual ke luar, sementara kita hanya *melongo*. Rasanya kita dapat pembagian keuntungan dan produksi. Stigma negatif boleh jadi karena kita trauma dengan Freeport dan PMA lain. Nah, mengapa tidak melihat PMA lain yang keuntungannya sama-sama dinikmati. *Point* saya adalah tidak ada kasus ekstrem kecuali kalau kita sendiri yang membiarkan terjadi.

Sejauh manakah transformasi tersebut mampu menjamin berlangsungnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penciptaan struktur ekonomi yang berkeadilan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang berkesinambungan?

Apa iya, semua masalah pembangunan kita harus diselesaikan dengan privatisasi? Mengelola negara dan perekonomian itu kan memerlukan banyak sekali instrumen, pilihan kebijakan, dan aturannya. Kalau mau dipaksakan untuk menjelaskan pertanyaan anda begini:



Bukankah asumsi sebab akibat itu terjadi kalau *policy option* terus dibahas dan didebatkan dengan publik, serta praktek korupsi terus kita perangi, dst-dst....

Privatisasi otomatis meningkatkan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, lantas bagaimana dengan independensi sektor negara dalam membuat dan melaksanakan regulasi dapat dilindungi dari pengaruh swasta dan tekanan kepentingan swasta?

Di negara sosialis/komunis negara memakai instrumen termasuk institusi perusahaan (BUMN) untuk kepentingan rakyat -yang terjadi kolusi negara dan BUMN penyelewengan kekuasaan dan korupsi-, tentu saja ini merugikan rakyat. Di negara kapitalis (liberal -menurut istilah Sony pada pertanyaan sebelumnya) negara di *lobby* perusahaan untuk membuat peraturan yang menguntungkan perusahaan, ini lah yang dinamakan kolusi perusahaan dan negara merugikan rakyat. Maksud saya, dengan menggunakan jalur apa saja baik kepemilikan negara atau melalui jalur swasta, kalau negara memang rapuh dan rawan korupsi ya hasilnya tetap merugikan rakyat.

Saya rasa kita semua memang trauma dengan pengalaman bahwa negara bukan insitusi yang bisa dipercaya untuk mengelola kekuasaan secara baik dan tidak korup. Namun demikian bukan berarti kita harus liberal total dan percaya pada kekuasaan market murni, toh persoalannya tetap negara sebagai insitusi harus dibangun menjadi insitusi yang bersih, korup, dan amanah.

Bagaimana jika privatisasi makin melipatgandakan peluang swasta untuk penguasaan modal? Apakah ini tidak akan mengorbankan negatif pada layanan dasar bagi masyarakat?

Kalau yang menang privatisasi adalah pihak swasta yang korup saya memang tidak optimis dengan hasil dan dampak positif. Ini sama saja

memindahkan korupsi dari negara murni ke dalam kongsi negara dan swasta. Tapi kalau pembeli BUMN adalah perusahaan internasional yang punya reputasi baik (modal, teknologi, dll) saya lebih optimis, karena mereka akan dibatasi juga oleh aturan *governance* internasional yang makin ketat. Masalah Enron di Amerika menyebabkan pasar modal internasional makin ketat menerapkan *governance* yang baik, saya lebih optimis ini akan memberikan hasil baik.

Dengan melihat praktek privatisasi di Indonesia yang penuh dengan nuansa korup, kolusi dst... berarti privatisasi justru akan mengalami kegagalan? Nah, apa yang seharusnya dilakukan IMF jika kondisinya seperti ini?

Tidak ada, yang penting bukan IMF tetapi bangsa saya mau ke mana dan menggunakan pemikiran serta strategi apa untuk mencapai cita-citanya sendiri. Debat publik yang sehat dan tidak stigmatif akan memberikan harapan yang lebih baik kepada pencarian alternatif kebijakan yang terbaik buat bangsa kita. Jangan lupa, semua bangsa besar di dunia dibangun dengan pergulatan otak, otot, darah, dan air mata. Perjuangan itu juga melalui beberapa generasi. Tidak ada yang mudah dan tidak ada hitam putih yang *strict* dalam kebijakan publik, yang ada hanya upaya teguh, tekun, dan terus menerus untuk mencapai keyakinan baik kita.

Bagaimana dengan peran pemerintah Indonesia dalam penerapan privatisasi ini?

Sayang reputasi privatisasi Indonesia banyak didistorsi dengan berbagai praktek yang menimbulkan resistensi publik dan politisasi yang keruh. Kegagalan kita dalam menjelaskan kepada publik mengenai tujuan privatisasi, kegagalan kita dalam perencanaan dan eksekusi proses privatisasi yang bersih dan kredibel, dan tidak adanya penjelasan pemerintah bahwa sudah ada atau akan dibuat peraturan dan perundangan untuk menjaga dan menjamin kepentingan publik pasca privatisasi telah menimbulkan kecurigaan dan bahkan perlawanan publik terhadap kebijakan privatisasi. Sentimen ini akan mudah dimanfaatkan oleh kelompok politik untuk mendiskreditkan pemerintah yang melakukan privatisasi, menyerang pihak eksekutor dan pihak yang pro sebagai tidak nasionalis dan menjual kepentingan negara, mengkritik privatisasi hanya sebagai alat menopang defisit APBN saja, juga mencurigai dan mengalihkan persoalan pada pihak luar seperti IMF dan WB sebagai biang kekisruhan privatisasi. Lebih buruk, kekisruhan ini sering menyebabkan posisi investor menjadi korban, yang akan menimbulkan suasana dan perasaan jera bagi mereka

yang akan menanamkan modal di negeri kita. Akibatnya semua pihak kecewa pada privatisasi, sehingga akan mudah membuat kesimpulan salah yaitu jangan atau tidak usah privatisasi saja. Yang menang adalah mereka yang menikmati BUMN yang tidak efisien dan korup sebagai alat sapi perah selamanya. Yang merugi adalah masyarakat dan pemerintah, serta perekonomian seluruhnya. Silahkan ditimbang dan disimak.